

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya :

- a. RLS memberikan pengaruh negatif serta signifikan pada TPAK di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2013-2024. Hal ini mengindikasikan bahwasannya semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka kecenderungan untuk menunda masuk pasar kerja semakin besar karena penduduk lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lebih selektif dalam memilih pekerjaan, serta adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja.
- b. UMK memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan pada TPAK di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2013-2024 sehingga dapat disimpulkan bahwa UMK tidak berdampak terhadap TPAK. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan UMK tidak memberikan dampak yang berarti terhadap keputusan penduduk usia kerja untuk berpartisipasi di pasar kerja.
- c. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK berdampak negatif namun tidak signifikan pada TPAK di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2013-2024 sehingga dapat disimpulkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tidak berpengaruh terhadap TPAK. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten belum mampu secara langsung mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja.
- d. Jumlah Perusahaan Industri Sedang dan Besar memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2013-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah industri sedang dan besar yang beroperasi di suatu wilayah, maka semakin besar pula dorongan bagi penduduk usia kerja untuk aktif berpartisipasi di pasar kerja.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya menjaga dan meningkatkan TPAK di wilayahnya diantaranya yakni :

- a. Pemerintah Provinsi Banten disarankan mendorong pemerataan pembangunan sektor industri sedang dan besar ke seluruh wilayah yang ada di Provinsi Banten agar tidak hanya terpusat pada satu wilayah. Hal ini guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menahan laju urbanisasi yang berlebih ke kawasan pusat kota.
- b. Pemerintah Provinsi Banten diharapkan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan terkoordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota untuk mampu mengatasi adanya disparitas atau ketimpangan ekonomi yang terjadi sekaligus menggeser arah pertumbuhan ekonomi ke arah sektor padat karya yang lebih inklusif dalam menyerap tenaga kerja lokal secara merata.
- c. Pemerintah daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Banten disarankan untuk mendorong pertumbuhan industri sedang dan besar melalui kemudahan perizinan usaha dan penciptaan iklim investasi yang kondusif pada tingkat regional yang kemudian diimbangi dengan regulasi perlindungan ketenagakerjaan agar arus migrasi tidak memicu penumpukan angkatan kerja tidak terampil (*unskilled labor*).
- d. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten perlu memperkuat program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja terpadu melalui Badan Latihan Kerja (BLK) yang fokusnya terhadap kebutuhan industri lokal guna mengatasi permasalahan *missmatch* antara kualifikasi pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja serta meminimalisir kecenderungan penduduk menunda masuk pasar kerja.
- e. Pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi kebijakan UMK dimana penetapan UMK perlu diimbangi dengan upaya aktif penciptaan lapangan kerja yang memadai serta penyediaan bursa kerja terpadu (*job center*) berbasis digital untuk memotong masa tunggu kerja sehingga peningkatan

upah minimum dapat berjalan beriringan dengan perluasan akses peluang kerja yang nyata bagi para pencari kerja baru.

5.2.2 Saran Akademis

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi studi berikutnya yang akan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi TPAK, diantaranya sebagai berikut :

- a. Studi berikutnya diharapkan untuk memperluas cakupan wilayah tidak hanya pada 8 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tetapi dapat diperluas ke skala antar provinsi hingga nasional sehingga hasil penelitian dapat lebih memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan TPAK di Indonesia.
- b. Studi berikutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independen lainnya yang secara teoritis masih relevan namun belum tercakup pada studi ini, seperti IPM, tingkat kemiskinan, investasi daerah, jumlah pengangguran, jumlah penduduk usia kerja, dan faktor lainnya mengingat nilai koefisien determinasi pada studi ini hanya yakni 12,01% yang mengindikasikan masih banyak faktor lain yang memengaruhi TPAK.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara jumlah industri sedang dan besar dengan TPAK mengingat masih sangat terbatasnya literatur yang secara spesifik membahas variabel tersebut sehingga dapat memperkaya kajian literatur di bidang ketenagakerjaan.
- d. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji sensitivitas terhadap variabel Jumlah Industri Sedang dan Besar mengingat distribusi jumlah unit industri antarwilayah di Provinsi Banten yang tidak merata. Uji sensitivitas tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan wilayah yang memiliki konsentrasi industri ekstrem dari model regresi ataupun dengan melakukan analisis sub sampel berdasarkan basis perekonomian wilayah, baik industri maupun pertanian. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kestabilan (*robustness*) hasil estimasi, sehingga kesimpulan penelitian tidak hanya dipengaruhi oleh sekelompok kecil wilayah tertentu.